

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
DALAM PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN  
PADA KANTOR DESA PEGALANGAN  
KIDUL KECAMATAN MARON  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana akuntan (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:  
Moh. Sofyan  
NIM: E20183025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2023**

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
TERHADAP PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN  
PADA KANTOR DESA PEGALANGAN  
KIDUL KECAMATAN MARON  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana akuntan (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:  
Moh. Sofyan  
NIM: E20183025  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI H. ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurul Widyawati', is written over a large, empty oval shape that serves as a placeholder for a stamp or seal.

**Dr. Nurul Widyawati, I.R., S.Sos, M.Si**  
NIP. 197509052005012003

# ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR DESA PEGALANGAN KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO

## SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis

Tanggal: 14 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.  
NIP: 197608122008011015

Nur Hidayat, SE., MM.  
NIP: 197905052023211015

Anggota

1. Dr. Moh. Haris Balady, SE., MM.
2. Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S An-Nisa’ ayat 58)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segenap rasa syukur yang telah memberikan kemudahan dan pemahaman sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. Karya yang sangat sederhana ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Abdullah dan Ibu Siti Romlah terima kasih atas kesabaran dan doa yang selalu dipanjatkan. Motivasi dan dukungan yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kesehatan dan umur yang barokah.
2. Serta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan serta menjadi inspirasi demi keberhasilan penulis.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan dan teman-teman seangkatan Akuntansi Syariah angkatan 2018, khususnya Akuntansi Syariah 1 yang berjuang bersama dan memberikan semangat, perhatian, do'a, serta terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah Ikhlas dan sabar dalam mengajari dan menyalurkan ilmunya, semoga Allah SWT membalas jasa-jasa kelian dengan pahala yang tak terhingga.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.



## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Skripsi dengan judul “ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR DESA PEGALANGAN KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO”, di susun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember. Kesuksesan ini dapat peneliti peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti menyadari dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifai'I, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Nur Ika Mauliyah SE., M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah
4. Ibu Nurul Widyawati Islammi Rahayu selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran dan ketulusan telah menyediakan waktu, tenaga, maupun pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi.
5. Bapak Muhammad Saiful Anam, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Bapak Badrul Huda beserta perangkat desa dan masyarakat Pegalangan Kidul yang telah berkenan untuk peneliti wawancara.

8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis.

Keberhasilan peneliti tidak lepas dari karunia Allah SWT yang memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini, dan semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca terlebih bagi peneliti sendiri. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalaham dan kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran dalam membenahan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala amal baik yang bapak/ibu/saudara/i berikan kepada peneliti mendapatkan balasan kebaikan yang lebih dari Allah SWT.

Jember, November 2023





## **ABSTRAK**

**Moh Sofyan, Dr. Nurul Widyawati, I.R.,** : “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan Pada Kantor Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)”

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan tanggung jawab bagi pihak yang mempercayakan tanggung jawab. Pembahasan tentang akuntabilitas mengarah pada upaya-upaya pengalihan skema internal organisasi yang bersandar pada aspek profesionalisme di satu sisi dan relasi eksternal yang mengarah pada pertanggung jawaban sosial dan politik di sisi lain.

Laporan keuangan desa merupakan bagian dari laporan kinerja pemerintahan desa selama periode anggaran pemerintahan desa. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dan masyarakat. Dengan tidak adanya transparansi dana dari desa menimbulkan pertanyaan apakah dana yang sudah dialokasikan kepada desa sudah sesuai secara pelaksanaan dan pencatatan laporan keuangannya.

Dalam skripsi ini terdapat tiga fokus penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa di Desa Pegalangan Kidul? 2. Mengapa Desa Pegalangan Kidul belum menerapkan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan Desa? 3. Bagaimana Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo bisa berkembang dengan pengelolaan laporan keuangan yang kurang transparansi?

Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara langsung terjun ke lapangan.

Kesimpulan: 1. Akuntabilitas Desa Pegalangan Kidul sudah lengkap baik dilihat dari segi ringkasan pendapatan, ringkasan belanja desa dan rincian pembangunan. 2. Transparansi di Desa Pegalangan Kidul belum tersedia. 3. Desa Pegalangan Kidul bisa maju dikarenakan inofasi dari kepala desa dan kekompakan masyarakat Pegalangan Kidul dalam melaksanakan program kerja di Desa Pegalangan.

**Kata Kunci : Akuntabilitas dan Transparansi, Laporan Keuangan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPS.. .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Pustaka.....	13
1. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	26
1. Akuntabilitas.....	26
2. Transparansi.....	29
3. Alokasi Dana Desa .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Subyek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Analisis Data .....	43
F. Keabsahan Data.....	44

G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	60
1. Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Pegalangan Kidul .....	60
2. Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Pegalangan Kidul	64
3. Desa Pegalangan Kidul Mampu Maju Tanpa Transparansi Dana Desa.....	67
C. Pembahasan Temuan.....	68
1. Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Pegalangan Kidul .....	68
2. Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Pegalangan Kidul	70
3. Desa Pegalangan Kidul Mampu Maju Tanpa Transparansi Dana desa.....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akuntansi merupakan ilmu yang menyediakan informasi untuk keperluan dalam berbagai kegiatan dan mengevaluasi setiap kegiatan suatu entitas, informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi diperlukan untuk perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban entitas. Ditinjau dari segi kegiatannya, akuntansi dapat diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas.<sup>1</sup>

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntabilitas yang terjadi dipemerintahan sering diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah kepada publik. Pemerintah melaksanakan akuntabilitas untuk transparansi atas penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan yang melakukan akuntabilitas sosial cenderung akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keakuratan laporan keuangan yang dilaporkan telah mengalami beberapa *review* dari berbagai pihak dalam internal

---

<sup>1</sup> Al Haryono Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1*, (Yogyakarta: STIE .YKPN, 2011), 5.

perusahaan.<sup>2</sup> Pertanggungjawaban pemerintah bisa terwujud dengan penyediaan informasi mengenai setiap kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama masa satu periode. Akuntansi pemerintahan diharuskan juga memberikan informasi mengenai proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah.

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan tanggung jawab bagi pihak yang mempercayakan tanggung jawab. Pembahasan tentang akuntabilitas mengarah pada upaya-upaya pengalihan skema internal organisasi yang bersandar pada aspek profesionalisme di satu sisi dan relasi eksternal yang mengarah pada pertanggungjawaban sosial dan politik di sisi lain.<sup>3</sup>

UU nomor 6 tahun 2014 pasal 71 ayat 1 menjelaskan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu usaha untuk mengurangi terjadinya praktik penyimpangan di pemerintahan adalah dengan menerapkan sistem akuntabilitas publik yang baik. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan (dikelola secara terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan partisipatif

---

<sup>2</sup> Kasmir, pengantar manajemen keuangan (Jakarta : Kencana Predana Media Grup), 114.

<sup>3</sup> Arif Widyatama, *jurnal riset dan aplikasi : akuntansi dan manajemen*, (kalimantan : STIE Panca Bhakti Palu, 2015), 203

(melibatkan masyarakat dalam prosesnya). Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah.<sup>4</sup>

Laporan keuangan desa merupakan bagian dari laporan kinerja pemerintahan desa selama periode anggaran pemerintahan desa. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dan masyarakat. Dengan tidak adanya transparansi dana dari desa menimbulkan pertanyaan apakah dana yang sudah dialokasikan kepada desa sudah sesuai secara pelaksanaan dan pencatatan laporan keuangannya.<sup>5</sup>

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi dua puluh sembilan Kabupaten, salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur adalah Kabupaten Probolinggo, di Kabupaten Probolinggo terdapat dua puluh empat Kecamatan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo adalah Kecamatan Maron, dalam Kecamatan Maron terdapat delapan belas desa. Desa Pegalangan kidul merupakan salah satu dari delapan belas Desa (Desa Brabe, Brani Kulon, Brani Wetan, Brumbungan Kidul, Ganting Kulon, Ganting Wetan, Gerongan, Kedungsari, Maron Kidul, Maron Kulon, Maron Wetan, Puspan, Satreyan, Suko, Sumberdawe, Sumberpoh, Wonorejo) yang ada di Kecamatan Maron. Desa pegalangan Kidul juga termasuk salah satu desa yang belum memberikan transparansi dana desa secara umum kepada masyarakat desa, hal ini disampaikan langsung oleh kepala desa Pegalangan Kidul “Desa Pegalangan

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

Kidul memang belum menyediakan informasi terkait pengelolaan laporan keuangan Desa”<sup>6</sup>.

Menariknya dengan kurangnya transparansi dari Desa Pegalangan Kidul tidak membuat Desa Pegalangan Kidul sulit maju dan berkembang, justru sebaliknya Desa Pegalangan Kidul mampu maju dan berkembang dibandingkan Desa-desanya lain yang ada di Kecamatan Maron (Desa Brabe, Brani Kulon, Brani Wetan, Brumbungan Kidul, Ganting Kulon, Ganting Wetan, Gerongan, Kedungsari, Maron Kidul, Maron Kulon, Maron Wetan, Puspan, Satreyan, Suko, Sumberdawe, Sumberpoh, Wonorejo). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan fisik yang terealisasi, juga menjuarai Desa bersih dan sehat dalam ajang proklamasi, serta banyaknya program kerja yang masih aktif sampai sekarang seperti bank sampah, daur ulang sampah dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Akan tetapi dengan tidak adanya transparansi dan yang diberikan oleh Desa Pegalangan Kidul membuat kepercayaan masyarakat terhadap program kerja desa Pegalangan Kidul sedikit menimbulkan keraguan dikarenakan tidak adanya transparansi dana yang diberikan oleh desa. Transparansi pengelolaan dana di desa Pegalangan Kidul belum terealisasi terbukti dengan tidak adanya media yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang laporan keuangan desa dalam bentuk poster, baliho, spanduk dan sebagainya. Berbeda dengan Desa Pendil Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo yang memberikan transparansi dana Desa dengan menggunakan banner atau baliho

---

<sup>6</sup> Wawancara, Badrul Huda, pada tanggal 05 maret 2023

<sup>7</sup> Ibid

sebagai medianya.<sup>8</sup> Alasan peneliti memilih Desa Pegalangan Kidul karena Desa pegalangan Kidul lebih maju daripada Desa lain yang ada di Kecamatan Maron baik dari segi pembangunan serta program kerja yang dilaksanakan oleh perangkat Desa Peglangan Kidul. Desa Pegalangan Kidul juga masuk dalam lima besar penerima anggaran serta realisasinya.

**Tabel 1.1**

**Nama Desa Dengan Anggaran Terbanyak di Kecamatan Maron**

No	Nama Desa	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Brabe	2.876.374.325	2.582.20.280
2	Maron Kidul	2.602.513.692	2.551.199.455
3	Satrean	2.365.639.524	2.232.741.820
4	Wonorejo	2.166.500.505	2.102.036.241
5	Pegalangan Kidul	2.009.964.319	1.939.799.859

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Desa pada Kantor Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo”**.

**B. Fokus Penelitian**

Penentuan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif didasarkan pada hasil studi pengalaman, referensi, atau saran dari orang yang dianggap ahli. Fokus dari penelitian ini masih bersifat sementara, masih akan ada perkembangan dari fokus penelitian ini setelah peneliti turun langsung

<sup>8</sup> Ibid



kelengkapan. Setelah fokus penelitian sudah ditentukan, selanjutnya adalah membuat rumusan masalah. Masalah adalah suatu kondisi yang bersumber pada hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi atau menimbulkan tanda tanya sehingga memerlukan upaya untuk menemukan jawaban. Rumusan masalah merupakan pedoman awal bagi peneliti untuk mencari jawaban dalam penelitian tersebut.<sup>9</sup> Pertanyaan penelitian tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian akan tetapi dirumuskan untuk mengetahui gejala yang kompleks, interaksi sosial yang terjadi, atau kemungkinan ditemukannya teori baru.<sup>10</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti mengemukakan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa di Desa Pegalangan Kidul?
2. Mengapa Desa Pegalangan Kidul belum menerapkan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan Desa?
3. Bagaimana Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo bisa berkembang dengan pengelolaan laporan keuangan yang kurang tranparansi?

### **C. Tujuan penelitian**

Secara umum, tujuan penelitian bersifat tiga jenis yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penelitian yang bersifat penemuan yaitu penelitian yang datanya diperoleh benar-benar baru yang sebelumnya belum

---

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 290

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 209-210.

pernah diketahui. Penelitian yang bersifat pembuktian yakni penelitian yang datanya diperoleh untuk membuktikan suatu keraguan terhadap informasi yang diterima. Sedangkan penelitian yang bersifat pengembangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperluas hasil penelitian terdahulu.<sup>11</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan laporan keuangan desa meliputi kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tujuan penelitian merupakan sebuah arah bagi peneliti agar penelitian berjalan secara struktural dan tidak melewati batas permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa di Desa Pegalangan Kidul.
2. Untuk mengetahui mengapa Desa pegalangan Kidul belum transparan dalam pengelolaan laporan keuangan desa?
3. Untuk mengetahui bagaimana Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo bisa berkembang dengan pengelolaan laporan keuangan yang kurang transparansi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kegunaan atau kontribusi yang dapat diberikan setelah penelitian. Kegunaan yang diberikan dapat berupa kegunaan teoritis dan praktis.<sup>12</sup> Dalam penelitian kualitatif, kegunaan penelitian lebih

---

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 3

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018) 45.

bersifat teoritis untuk pengembangan ilmu. Akan tetapi tidak menolak kegunaan praktis untuk pemecahan masalah.<sup>13</sup> Aspek teoritis dan praktis tersebut adalah :

#### 1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan sumbangan teori dan wawasan pengetahuan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan terhadap kantor Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo serta dapat dijadikan referensi atau rujukan dalam penelitian lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya.

#### 2. Aspek Praktis (Terapan)

##### a) Bagi peneliti

Diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan terhadap kantor Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

##### b) Bagi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Diharapkan dapat memberikan tambahan kajian untuk melengkapi kepustakaan yang berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan desa, serta menambah koleksi literatur atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

---

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, 291.

c) Bagi Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Diharapkan dapat memberikan referensi dalam penyusunan laporan keuangan Desa yang sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan lebih relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

d) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah kepercayaan masyarakat Desa Pegalangan Kidul terhadap pemerintahan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

## **E. Definisi istilah**

Definisi istilah menjadi titik fokus atau kata kunci peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah dari judul penelitian sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>14</sup>

### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan, 45.

langsung kepada rakyat. Dengan kata lain, bahwa akuntabilitas ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik.<sup>15</sup>

## 2. Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (*Openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.<sup>16</sup> Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat banyak. Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip *good governance* adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah

---

<sup>15</sup> Kumorotomo. Wahyudi, Akuntabilitas Birokrasi Publik, (Yogyakarta: Karya Pustaka Pelajar, 2005), hal. 3.

<sup>16</sup> Mardiasmo, akuntansi sektor publik 2009:30.

harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Berisi tentang deskriptif alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.<sup>17</sup> Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah:

Bab I : Pada bab ini meliputi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan dan literatur yang berhubungan dengan skripsi. Kajian kepustakaan terdiri dari penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis dengan akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan Desa. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat tentang teori akuntansi keuangan, dan teori laporan keuangan. Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

Bab III : Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk penelitian oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

---

<sup>17</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48.

Bab IV : Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, pada bagian ini berisi tentang inti atau hasil penelitian ini, yang meliputi latar belakang, obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

Bab V : Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti dan diakhiri dengan penutup.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Penelitian terdahulu

Peneliti mencantumkan beberapa referensi dari penelitian yang telah dilakukan pada sebelumnya. Kemudian membuat ringkasannya baik yang sudah terpublikasikan atau yang belum terpublikasikan, referensi yang dapat dicantumkan seperti skripsi, tesis, disertasi, atau yang lainnya. Dengan langkah ini, maka akan terlihat orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan.<sup>18</sup>

Berikut ini beberapa referensi-referensi hasil penelitian terdahulu:

- a. Nius Gwijangge, I Ketut Jati, I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, Ni Gusti Putu Wirawati (2021) melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas, Transparansi Pemerintah Desa dan Pengelolaan Dana Desa”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di desa Sembiran, kecamatan Tejakula, kabupaten Buleleng. Sampel yang digunakan sebanyak 127 yang terdiri dari kepala desa sekertaris desa Bendahara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat serta kepala seksi, dengan Teknik *probability sampling* dengan metode *prorporotionate stratifid ramandom sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan, 73-74.



analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas prinsip transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan baik dari sisi pemerintah desa maupun dari sisi masyarakat maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa itu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek penelitian serta teknik penelitian.<sup>19</sup>

- b. Nur. Asia Usman. Betan dan Paskah Ika Nugroho pada (2021) melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. jenis penelitian studi kasus dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa yang adalah aparat desa, perangkat desa, serta masyarakat umum. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan desa, laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan dokumen pendukung yakni bukti-bukti transaksi seperti

---

<sup>19</sup> Nius. Gwijangge, I. Ketut Jati, I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, Ni Gusti Putu Wirawati. “Akuntabilitas, Transparansi Pemerintah Desa dan Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Akuntansi* 31 .No. 6 (Juni 2021): 1549, <http://dx.doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i06.p16>

nota dan kwitansi yang dimiliki oleh pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis tematik yang melibatkan *coding text*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan Kepala Desa bersama sekretaris dan bendahara telah melibatkan masyarakat secara terbuka. Laporan pertanggungjawaban dapat diakses oleh masyarakat. Tahapan perencanaan dan eksekusi telah melibatkan tokoh masyarakat, kepala kampung, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan elemen lainnya. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan oleh bendahara serta sekretaris desa. Kemudian, laporan akan dimusyawarahkan kepada masyarakat melalui pertemuan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi dana desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti terletak pada objek penelitian.<sup>20</sup>

- c. Christa Yunnita Garung (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian *Good Governance* Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana Desa dan menginginkan tata kelola

---

<sup>20</sup> Nur. Asia Usman. Betan dan Paskah. Ika Nugroho. “*Akuntabilitas Dan. Transparansi Pengelolaan. Dana. Desa*”. 2021

yang baik di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data. Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat desa dan perangkat desa di Manulea. Berdasarkan metode purposive sampling, jumlah sampel yang diperoleh adalah 50 orang. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan kuesioner yang dianggap instrumen utama. Pada fase pengujian, peneliti menggunakan beberapa metode pengujian yang dianggap sangat penting untuk digunakan. Metode tersebut adalah: statistik deskriptif, statistik inferensial, tes asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka. . Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pangelolaan dana desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek penelitian yang diteliti.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Christa Yunnita Garung. *“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan*

d. Anggraeni Quro'atul M (2019) melakukan penelitian dengan judul " Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember tahun 2018". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk menganalisis akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018. Untuk menganalisis akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018. Untuk menganalisis akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya penelitian<sup>22</sup> yang dilakukan melalui prinsip akuntabilitas berupa tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2018. (1) Akuntabilitas Perencanaan ADD di Desa Tutul telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, (2) Akuntabilitas Pelaksanaan ADD di Desa Tutul telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, (3) Akuntabilitas Pertanggungjawaban ADD di Desa Tutul dalam pengelolaan administrasi ADD maupun dalam waktu SPJ telah mematuhi peraturan Undang-Undang yang berlaku. Persamaan

---

*Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manuela, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka". 2020*

penelitian ini adalah membahas akuntabilitas anggaran dana desa. Perbedaan penelitian ini adalah objek yang diteliti.<sup>23</sup>

- e. Arif Rivan & Irfan Ridwan Maksum (2019) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Tujuan dari penelitian ini adalah penerapan sistem keuangan Desa (siskeudes) untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya siskeudes ini diharapkan desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa, mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan keuangan desa bisa berjalan dengan baik dengan diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah membahas mengenai pengelolaan keuangan desa. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada topik penelitian, pada penelitian ini topik yang dipilih yaitu penerapan sistem keuangan desa (siskeudes), sedangkan pada penelitian yang akan diteliti memilih topik pengelolaan laporan keuangan desa.<sup>24</sup>
- f. I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini Tahun (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektifitas Pengelolaan Dana Desa”.

---

<sup>23</sup> Anggraeni Quro'atul M. “Akuntabilitas Pengelolaan. Alokasi Dan. Desa Di. Desa Tutul. Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. 2019

<sup>24</sup> Arif Rivan & Maksum, I.R. “Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 9, no. 2 (2019): 92, <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Sampel penelitian ini adalah 18 desa di Kecamatan Abiansemal dengan jumlah responden sebanyak 72 orang. Metode penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling, data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat maka efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung akan semakin baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pangelolaan dana desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek penelitian yang diteliti, penelitian ini dilakukan di Desa-desa yang ada di kecamatan Abiansemal, Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan di Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.<sup>25</sup>

- g. Sri Wahyuni (2019) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam

---

<sup>25</sup> I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini. *“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektifitas Pengelolaan Dan Desa”*. 2019

Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kuta Bakti Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa ( musyawarah desa ), akan tetapi hanya sampai perencanaan saja selebihnya dijalankan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan aparat desa dalam mengelola dana desa tersebut. kemudian penerapan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme tersebut, penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa kuta bakti dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat desa kuta bakti dalam pengelolaan

dana desa dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pangelolaan dana desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek penelitian yang diteliti, penelitian ini dilakukan di Desa Kuta Bakti, kecamatan Babul Makmur, kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan di Desa pegalangan kidul kecamatan maron kabupaten probolinggo.<sup>26</sup>

- h. Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, Stanly W. Alexander Tahun (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dari penyaluran alokasi dana desa kauneran salah satu kecamatan sonder kabupaten minahasa dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dan desa di desa kauneran satu kabupaten minahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban pengalokasian bertahap dana desa mulai dari penganggaran, pengalokasian, penggunaan, pelaporan, dan pemantauan atau evaluasi berjalan dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi

---

<sup>26</sup> Sri Wahyuni. “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)” .2019



pengelolaan dana desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek penelitian yang diteliti, penelitian ini dilakukan di Desa Kaunaren, kecamatan Sonder, kabupaten Minahasa, sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan di Desa pegalangan kidul kecamatan maron kabupaten probolinggo.<sup>27</sup>

- i. Hilya Izzah (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)”. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan transparansi dan akuntabel karena tim pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak melakukan transparansi dan akuntabel kepada masyarakat desa. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Madina Khususnya Kecamatan Panyabungan Selatan Desa Pagaran Gala-Gala dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan alokasi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah di dilaksanakan sesuai

---

<sup>27</sup> Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, Stanly W. Alexander. “*Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kaunaran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*”. 2018

dengan yang direncanakan. Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Pagaran Gala-Gala belum melakukan transparansi dan akuntabel kepada masyarakat desa karena tidak menyampaikan semua kegiatan yang telah terlaksana dan yang belum terlaksana.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai pengelolaan anggaran dana desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada topik penelitian, penelitian ini membahas mengenai analisis akuntabilitas anggaran dana desa, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai akuntabilitas dan trnsparansi pengelolaan lapporan keuangan desa.<sup>28</sup>

- j. Wahyu (2018) melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi desa yang mendapatkan jumlah ADD. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar

---

<sup>28</sup> Hilya Izzah. “ *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)*”. 2018

pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borong Pa'la'la sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti yaitu membahas mengenai perkembangan desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan kurangnya transparansi dana.<sup>29</sup>

**TABEL 2.1**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

	<b>NAMA</b>	<b>JUDUL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1	Nius Gwijangge, I Ketut Jati. I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri. Ni Gusti Putu Wirawati (2021)	Akuntabilitas, Transparansi Pemerintah Desa Dan Pengelolaan Dana Desa	Membahas terkait pengelolaan keuangan desa	Lokasi penelitian
2	Nur Asia Usman Betan, Paskah Ika Nugroho. (2021))	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa.	Membahas terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa	Lokasi penelitian
3	Christa Yunnita Garung (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian	Membahas terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa	Lokasi penelitian

<sup>29</sup> Wahyu. "akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (add) di desa borong pa'la'la kecamatan pattalassang kabupaten gowa". 2018

	<b>NAMA</b>	<b>JUDUL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
		Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka		
4	Angraini Qurra'atul M (2019)	Akuntabilitas. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember tahun 2018.	Membahas terkait akuntabilitas anggaran dana desa	Lokasi penelitian
5	Arif Rivan & Irfan Ridwan maksum (2019)	Penerapan system keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa	Membahas terkait pengelolaan keuangan Desa	Lokasi penelitian
6	I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini (2019)	Akuntabilitas Dan Transparansi pemerintah desa dalam Pengelolaan alokasi Dana Desa.	Membahas terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa	Lokasi penelitian
7	Sri Wahyuni (2019)	Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)	Membahas terkait pengelolaan keuangan Desa	Lokasi penelitian
8	Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, Stanly W. Alexander (2018)	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Kecamatan Winongan	Membahas terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa	Lokasi penelitian

	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		Kabupaten Pasuruan)		
9	Hilya Izzah (2018)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina).	Membahas terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa	Lokasi penelitian
10	Wahyu (2018)	Akuntabilitas Dan Transparansi pemerintah desa dalam Pengelolaan alokasi Dana Desa.	Membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa	Lokasi penelitian

Sumber: Data diolah, 2023.

## 2. Kajian teori

### a. Akuntabilitas

#### 1) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) hal ini sering digunakan dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*)

dan mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang menerangkannya.<sup>30</sup>

Akuntabilitas juga sebagai bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik.<sup>31</sup> Sedangkan akuntabilitas publik dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

## 2) Indikator akuntabilitas

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

### a. Tahap Perencanaan

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

<sup>30</sup> Dwi. Martani., dkk, *Akuntansi Keuangan. Menengah Berbasis PSAK*, Cet. 1 (jakarta : Salemba Empat, 2014), 54.

<sup>31</sup> Mardiasmo, *Akuntansi sektor publik* ( Yogyakarta : ANDI, 2004), 3.

3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Tahap Pelaporan

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan semester tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

c. Tahap Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Permerintah (RKP).

b. Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.<sup>32</sup> Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Kerangka Transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas lima komponen yaitu :

---

<sup>32</sup> Mardiasmo, *Akuntansi sektor publik* (Yogyakarta : ANDI, 2010),30.



### 1) Sistem perencanaan strategis

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus direncanakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan organisasi.

### 2) Sistem pengukuran kinerja

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumberdaya yang dianggarkan. Pengukuran kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama *review* tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

### 3) Sistem pelaporan keuangan

Dipublikasikan tahunan atau setiap periode tahun berjalan, maksimal satu bulan setelah satu tahun berjalan. Laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang

merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi

4) Saluran akuntabilitas publik

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

5) Auditing sektor publik

Dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran pencapaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti

berikut : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

a. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

c. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.<sup>33</sup>

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

c. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

---

<sup>33</sup> Mardiasmo, Akuntansi sektor publik (Yogyakarta : ANDI, 2009),

kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APB Desa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat, Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara *administrative*, teknis dan hukum, Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali., Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD), sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Untuk Pembiayaan Desa memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah

semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

#### 1) Tahap perencanaan

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga

kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

## 2) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

## 3) Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban Pelaksanaan pengalokasian, penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran dana desa sesuai dengan peraturan bupati probolinggo nomor 82 tahun 2020. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan. ADD dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut. Pelaksanaan alokasi dana desa didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas

- b. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
- c. Seluruh aktivitas dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum
- d. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- e. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya
- f. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat
- g. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan ditingkat daerah provinsi/ kabupaten/ kota/ kecamatan hingga desa.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis serta memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Pada penelitian ini, peneliti dituntut untuk mengetahui dan memahami metode dan sistematika penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu :

#### A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami situasi sosial secara mendalam dan untuk meneliti suatu objek yang alamiah.<sup>34</sup> Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.<sup>35</sup>

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian dengan pendekatan kualitatif berupa kata-kata yang merupakan gambaran lengkap dari objek penelitian.

---

<sup>34</sup> Sugiyono, Metode Penelitian, 7-9.

<sup>35</sup> Sugiyono, Metode Penelitian, 7-9.



Penelitian kualitatif digunakan apabila masalah dalam penelitian masih belum jelas, untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, dan untuk memastikan kebenaran data.<sup>36</sup> Pada penelitian ini peneliti ingin mendiskripsikan bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan laporan keuangan yang ada di Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo serta menganalisis apakah pengelolaan laporan keuangan yang disajikan oleh Desa pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan.

## **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang akan dilaksanakannya penelitian. Pada penelitian ini lokasi penelitian bertempat di Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan objek dan lokasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo belum menerapkan akuntabilitas dan transparansi.
2. Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo berkembang menjadi Desa yang maju tanpa adanya transparansi dana Desa.

---

<sup>36</sup> Ibid., 24-25.

### C. Subyek penelitian

Subjek penelitian adalah orang dalam latar penelitian yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>37</sup> Subjek penelitian ini menggunakan *Purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud yaitu misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti.<sup>38</sup> Dalam hal ini, informasi atau data yang akan dikumpulkan berasal dari beberapa informan, diantaranya :

1. Bapak Badrul Huda selaku kepala Desa Pegalangan Kidul merupakan informan yang diharapkan peneliti dapat memberikan gambaran umum tentang Desa, serta pengelolaan kegiatan operasional yang ada di Desa Pegalangan Kidul.
2. Bapak Imam Masykuri selaku bendahara Desa merupakan informan yang diharapkan peneliti dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan, penyajian serta pelaporan keuangan yang ada di Desa Pegalangan Kidul.
3. Masyarakat sekitar yakni M. Ahsanur Rofi (Mahasiswa). Siti Nur Hasanah (Guru). Suhut (petani) yang diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai kegiatan operasional Desa pegalangan Kidul.

---

<sup>37</sup> Tim penyusun, *Pedoman penulisan*, 46.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 218-219.

#### D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah konsep Triangulasi yakni gabungan dari observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.<sup>39</sup> Pada setiap penelitian selalu digunakan alat pengumpul data yang selanjutnya disebut sebagai teknik pengumpulan data, ditujukan kepada informan, yakni kepala Desa Pegalangan Kidul, bendahara Desa dan masyarakat Desa Pegalangan Kidul sebagai bentuk upaya peneliti guna mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan mengenai “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Desa pada Kantor Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo”. Alasan peneliti menggunakan teknik triangulasi dikarenakan tidak adanya pengumpulan data yang lengkap, detail, atau benar-benar sempurna untuk mendapatkan informasi dengan hanya menggunakan satu cara (tunggal). Penggunaan triangulasi ini sangat membantu peneliti dalam penelitian kualitatif. Pada umumnya, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam arti menggunakan teknik wawancara dan pengamatan dilapangan. Pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis bukan sekedar melaksanakan pembicaraan singkat atau hanya berada dilapangan. Peran peneliti sangatlah penting karena peneliti adalah instrumen utama dalam sebuah penelitian kualitatif, keterlibatan peneliti harus berkualitas yang menuntut keahlian, keterampilan, dan pengetahuan yang luas.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta , 2012), hal. 293.

<sup>40</sup> 4 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) .111.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi partisipatif atau pengamatan langsung di lokasi penelitian, dan wawancara tidak terstruktur atau terbuka terhadap beberapa informan yang dianggap mampu memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi saat penelitian berlangsung serta data pendukung lainnya yang didapatkan diluar observasi dan wawancara, seperti catatan kas penerimaan dan pengeluaran, dan dokumen lainnya yang mendukung.

#### 1. Pengamatan langsung (observasi)

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti dapat merefleksikan kegiatan dan interaksi kepada subjek penelitian secara sistematis. Semua kondisi dilapangan dapat dicatat dan direkam dengan teliti sesuai dengan topik penelitian. Pengamatan ini sangat membantu karena peneliti dapat menganalisis fenomena atau kondisi sosial secara langsung, sehingga dapat memperluas wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Tahapan dalam proses observasi ini meliputi pengamatan secara umum, selanjutnya mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek penelitian, serta pencatatan hasil pengamatan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Surakarta: t.p., 2014) 132-133.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Pihak yang di wawancarai disebut sebagai narasumber, yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur atau terbuka. Wawancara Tidak Terstruktur bertujuan untuk mendapatkan informasi bukan baku atau bukan informasi yang bersifat tunggal. Perbedaan wawancara teknik ini dengan wawancara terstruktur yaitu waktu bertanya dan memberikan jawaban lebih bersifat bebas. Selain itu, narasumber yang diwawancarai terbatas karena pemilihan narasumber yang dilakukan dengan memilih orang-orang tertentu yang dianggap memahami kondisi sosial yang mendalam dan luas.<sup>42</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa catatan, gambar, dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Hasil pengumpulan data dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel apabila didukung dengan dokumen-dokumen baik catatan, gambar, atau yang lainnya sesuai dengan keadaan aslinya.

---

<sup>42</sup> Ibid., 125-127.

## E. Analisis data

Teknik analisis data difokuskan ketika penelitian berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yaitu analisis data yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas. Dalam model ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).<sup>43</sup> Berikut merupakan Langkah-langkah peneliti dalam melakukan analisis data:

### 1. Reduksi data

Data dalam penelitian kualitatif dipaparkan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mencari kesamaan dan perbedaan informasi. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pengklasifikasian, penggolongan, atau penyederhanaan informasi yang meluas dari catatan lapangan. Dalam proses reduksi data, peneliti berpedoman pada tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah fokus pada temuan. Jawaban atau informasi yang didapatkan dari proses wawancara harus di periksa melalui pengamatan atau dokumentasi, sehingga benar-benar ditemukan data yang sesungguhnya secara menyeluruh. Reduksi data juga diartikan sebagai proses berfikir sensitif yang membutuhkan pemahaman dan wawasan peneliti yang mendalam, sehingga dapat mereduksi data yang memiliki temuan dan pengembangan teori yang signifikan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sugiyono, Metode Penelitian, 246

<sup>44</sup> Hardani, Metode Penelitian, 167.

## 2. Penyajian data

Penyajian data dalam suatu penelitian kualitatif harus disajikan dalam bentuk yang kompleks dan narasi deskriptif yang lengkap. Pada umumnya dilengkapi dengan bagan, skema, grafik, gambar, dan sebagainya agar data dapat dibaca secara jelas, rinci, dan mudah dipahami. Tujuan penyajian data ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebagai fokus penelitian, maka dari itu data harus dikemas secara sistematis agar membantu peneliti dalam melakukan analisis.<sup>45</sup>

## 3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian atau keputusan sebelumnya. Kesimpulan harus dibuat relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, kesimpulan bukanlah suatu ringkasan dari semua data yang ditemukan melainkan jawaban dari semua permasalahan yang dirumuskan pada penelitian tersebut. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang menjadi fokus penelitian.<sup>46</sup>

## F. Keabsahan data

Teknik yang harus dicapai untuk menyatakan bahwa data yang di analisis benar-benar diperoleh secara alami dan umum yaitu menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam uji keabsahan data, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif

---

<sup>45</sup> Farida Nugrahani, Metode Penelitian, 175-176.

<sup>46</sup> Hardani, Metode Penelitian, 170-171.

temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila data yang ditemukan peneliti dengan data pada objek penelitian tidak ada perbedaan yang signifikan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas yang meliputi :

a. Peningkatan ketekunan

Meningkatkan ketekunan dapat menambah pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan ini maka data dapat diperoleh dengan pasti dan sistematis.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik penggabungan dari beberapa teknik pengumpulan data yang sudah ada. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data yang berbeda tetapi menggunakan teknik yang sama. Dalam triangulasi ini terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

c. Mengadakan *member check*

Proses ini merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pengujian keabsahan data, peneliti harus melakukan pengecekan dan pemeriksaan kepada pihak pemberi data. Apabila data yang telah ditemukan dapat disepakati oleh pihak pemberi data, maka data temuan dapat dikatakan valid sehingga akan semakin kredibel/dipercaya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Sugiyono, Metode Penelitian, 272-276.



## G. Tahap-tahap penelitian

Tahapan penelitian merupakan persiapan yang dilakukan oleh peneliti untuk menunjang kelancaran dalam proses penelitian. Beberapa tahapan yang biasa dilakukan oleh peneliti berupa persiapan sebelum penelitian, saat penelitian, maupun sesudah penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian adalah sebagai berikut:

### a. Tahap pra penelitian

- 1) Penentuan topik dan judul penelitian.
- 2) Pemilihan objek dan lokasi penelitian.
- 3) Pencairan literatur atau referensi sebagai badan pendukung.
- 4) Penyusunan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian untuk proses pengajuan kepada Kepala Program Studi.
- 5) Konsultasi kepada kepala program studi hingga mendapatkan persetujuan.
- 6) Pengurusan surat pengesahan judul, surat tugas Dosen Pembimbing Skripsi, dan surat ijin penelitian.
- 7) Penyerahan surat pengesahan judul dan surat tugas kepada Dosen Pembimbing Skripsi, serta surat ijin penelitian kepada pihak lokasi penelitian.
- 8) Penyusunan proposal atau rencana penelitian.
- 9) Pencarian sumber referensi dan studi kepustakaan untuk menunjang dalam penyusunan proposal, serta
- 10) Konsultasi dan Bimbingan kepada Dosen Pembimbing

b. Tahap lapangan

- 1) Pemantapan konsep dan latar belakang penelitian
- 2) Penggalan informasi melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- 3) Pengumpulan data, analisis data, dan pengujian keabsahan data
- 4) Penarikan kesimpulan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### a. Kondisi geografi Desa

Desa Pegalangan Kidul merupakan salah satu dari 18 (Delapan belas) desa di Kecamatan Maron dan salah satu dari 325 (Tiga ratus dua puluh lima) desa / kelurahan di kabupaten Probolinggo. Desa pegalangan kidul memiliki luas 240 Ha. yang terdiri dari tanah sawah dan tanah kering, berlokasi 16 km diarah barat selatan kota probolinggo serta berada di ujung palang barat desa-desa di kecamatan Maron.<sup>48</sup>

Sejak berdirinya Desa Pegalangan kidul ada 6 (Enam) kepala desa yang memimpin Desa. Mulai dari nama pak tanggi dan setelah itu sesuai regulasi terbaru di wilayah Kabupaten Probolinggo dengan sebutan kepala Desa. Adapun daftar nama kepala Desa Pegalangan Kidul adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
LEMBER

**TABEL 4.1**  
**Nama kepala Desa Pegalangan Kidul**

No	Nama	Tahun
1.	Soepin	1946-1950
2.	Roebiyati Asiman	1950-1968
3.	Moulyosari	1968-1985
4.	N. Djamal	1985-2003
5.	Moh Romli	2003-2015
6.	Badrul Huda	2015-sekarang

Sumber: LPPD Tahun 2022

<sup>48</sup> Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

Luas Wilayah Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron adalah 240 ha merupakan daerah daratan rendah, dengan ketinggian 0 – 8 M dari permukaan air laut. Wilayah Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron sebagian besar merupakan tanah sawah dan sebagian kecil Tanah pekarangan yang ditempati perumahan penduduk, dengan hasil utama berupa padi. Batas wilayah Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bulang Kecamatan Gending
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa alassapi Kecamatan Banyuwang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pikatan Kecamatan Gending
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron

Selain itu Desa pegalangan Kidul memiliki wilayah sebanyak 6 dusun dengan 15 Rt dan 6 Rw

1. Dusun Krajan terdiri dari Rt 1 sampai Rt 4 Rw 1
2. Dusun Pandian terdiri dari Rt 5 sampai Rt 6 Rw 2
3. Dusun Sukun terdiri dari Rt 7 sampai Rt 8 Rw 3
4. Dusun Bukara terdiri dari Rt 9 sampai Rt 10 Rw 4
5. Dusun Paras terdiri dari Rt 11 sampai Rt 13 Rw 5
6. Dusun Bunut terdiri dari Rt 14 sampai Rt 15 Rw 6

a. Gambaran Umum Demografis.

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3.015 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.457 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.558 jiwa.

Survei data sekunder dilakukan oleh fasilitator pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembandingan dari data yang ada di PemDes. Survei data sekunder yang dilakukan pada bulan Desember 2022, berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dari blanko yang di isi oleh ketua Rt di lingkungan masing-masing. Didapatkan data seperti yang ada ditabel berikut.<sup>49</sup>

**TABEL 4.2**

**Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki – laki	1.457	49%
2	Perempuan	1.558	51%
	<b>Jumlah</b>	<b>3.015</b>	<b>100%</b>

Sumber: LKJP tahun 2022

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Pegalangan Kidul 3.015 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.457 jiwa atau 49% dari jumlah penduduk yang tercatat, sementara perempuan 1.558 jiwa atau 51% dari jumlah total penduduk yang tercatat.

Dimasing-masing kampung dapat diketahui prosentase terbesar populasi penduduk berdiam. Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap

<sup>49</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2022

tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Pegalangan Kidul di lakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan kepada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan di peroleh gambaran tentang kependudukan Desa Pegalangan Kidul yang lebih konprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Pegalangan Kidul berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut:

**Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia  
Desa Pegalangan Kidul Tahun 2022**

No	Kelompok usia	Jumlah	Prosentase
1	0-4	139	4,6
2	5-9	252	8,3
3	10-14	268	8,8
4	15-19	261	8,6
5	20-24	216	7,1
6	25-29	223	7,3
7	30-34	202	6,6
8	35-39	235	7,7
9	40-44	210	6,9
10	45-49	249	8,2
11	50-54	212	7,0
12	55-59	204	6,7
13	Di atas 60 TAHUN	129	0,055
<b>JUMLAH</b>		<b>3.015</b>	

Sumber: LKJP tahun 2022

Dari total jumlah penduduk Desa Pegalangan Kidul, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk usia 60 tahun keatas sebanyak 129 atau 0,055%.

Penduduk usia produktif pada usia antara 20-49 tahun di Desa Suko jumlahnya cukup signifikan, yaitu 1.179 jiwa atau 51,01% dari total jumlah penduduk.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah laki-laki usia produktif lebih banyak dari jumlah Perempuan. Dengan demikian sebenarnya laki-laki usia produktif di Desa Pegalangan Kidul dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dilakukan oleh perempuan. Pemberdayaan usaha perempuan usia produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.<sup>50</sup>

b. Kondisi ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pegalangan Kidul dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, Petani, buruh tani, PNS/TNI/Polri, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, buruh bangunan, Peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian  
Desa Pegalangan Kidul Tahun 2022**

No.	Macam pekerjaan	Jumlah	Prosentase dari total jml. Penduduk (%)
1	Belum/Tidak bekerja	390	0,16
2	Mengurus Rumah tangga	554	0,23
3	Pelajar/mahasiswa	108	0,04
4	Pensiunan	12	0,005
5	PNS	36	0,015
6	Kepolisian RI	1	0,0004
7	Perdagangan	46	0,019
8	Petani/Perkebunan	490	0,21
9	Industri	21	0,009
10	Kontruksi	1	0,0004
11	Karyawan swasta	109	0,04

<sup>50</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2022

12	Karyawan BUMN	0	0
13	Karyawan honorer	29	0,012
14	Buruh harian lepas	21	0,009
15	Buruh Tani/Perkebunan	453	0,19
16	Pembantu Rumah tangga	5	0,002
17	Tukang batu	0	0
18	Tukang kayu	7	0,003
19	Tukang las/pandai besi	3	0,001
20	Tukang jahit	6	0,002
21	Mekanik	6	0,002
22	Juru Masak	2	0,0008
23	Perangkat Desa	11	0,004
<b>Jumlah</b>		2.311	100%

Sumber: LPPD tahun 2022

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Pegalangan Kidul jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 83,12% dari jumlah tersebut kehidupannya bergantung di sektor pertanian ada 40,80% dari total jumlah penduduk.

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di desa Pegalangan Kidul memiliki alternatif pekerjaan selain sektor tani dan buruh tani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat bergantung dengan air irigasi. Disisi lain, air irigasi yan tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Pegalangan Kidul secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2022



c. Struktur Organisasi Desa

Melaksanakan pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa, Tugas Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Mengajukan Rencana Peraturan Desa
- c) Menetapkan Peraturan Desa
- d) Mengajukan Rencana APBDesa
- e) Membina kehidupan masyarakat Desa
- f) Membina perekonomian Desa
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan swadaya masyarakat
- h) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- i) Ketentraman dan ketertiban
- j) Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
- k) Pengembangan pendapatan desa dan sebagainya.

Berikut diterangkan data perangkat sesuai dengan tugas dan jabatannya:

- a. Badrul Huda S.Pd. Jabatan kepala Desa Suko. Tugas dan kewewenangnya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya,

---

<sup>52</sup> UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten .Dan sebagainya.

- b. MOH. Salim, Jabatan Sekretaris Desa Suko. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
- c. Riza Kartika, Tuffatun, Abdullah Rusdi, Basuki dan Kholil jabatan Kepala Dusun. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di dusunnya Dan Lain sebagainya.
- d. Moh. Alvin Faqih, Jabatan KASI Pemerintahan dan Trantib. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
- e. Sutopo, Misbahurrachman. KASI Pembangunan dan Kesra. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah mengumpulkan, mengolah, meng Evaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat. Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang

terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat. Dan lain sebagainya.

f. Mariyaul Ulfa, Imam Masykuri. KAUR Umum dan Keuangan, Tugas dan sebagian wewenangnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah. Dan lain sebagainya. Semua pelaksana kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa. pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat-rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. Dan lain sebagainya.

g. Totok Abdul Ghoffar, KAUR Perencanaan tugas dan wewenangnya adalah merencanakan penyusunan kegiatan pembangunan dan membantuh sekretaris desa dan sebagainya.<sup>53</sup>

d. Visi dan Misi Desa Pegalangan Kidul

Penyusunan RPJMDes Pegalangan Kidul sebagai pedoman program kerja PemDes bersama lembaga-lembaga tingkat desa dan seluruh warga masyarakat Desa Pegalangan Kidul maupun pihak yang berkepentingan. RPJMDes adalah pedoman program kerja untuk masa 6 tahun. RPJMDes sebagai pedoman program kerja untuk masa 6 tahun merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga

---

<sup>53</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2022

masyarakat Desa Pegalangan Kidul. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Pegalangan Kidul, merupakan arah kebijakan dari RPJMDes yang dirumuskan setiap 6 tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Pegalangan Kidul disebut juga sebagai Visi Desa Pegalangan Kidul.

Visi Desa Pegalangan Kidul disusun dari rangkaian panjang diskusi-diskusi formal maupun informal dengan segenap warga Pegalangan Kidul atau tokoh-tokoh masyarakat sebagai representasi dari warga masyarakat Pegalangan Kidul. Visi Desa Pegalangan Kidul semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terbentuknya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk kesempurnaan Review RPJMDes tahun 2022-2028 dengan *Metode Community Action Plan (CAP)*. Dalam kegiatan ini, semakin mendekatkan visi Desa Pegalangan Kidul dengan kenyataan yang ada di desa dan masyarakat. Kenyataan yang dimaksud baik merupakan potensi, permasalahan maupun hambatan yang ada di desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun kedepan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tertuang dalam Peraturan Desa Pegalangan Kidul Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2028. Visi dan Misi yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Desa

Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

Visi : “ **Bersama Masyarakat membangun desa yang makmur, aman dan mandiri melalui tata kelola pemerintahan yang transparan juga partisipatif menuju desa yang maju, mandiri dan berbudaya berdasarkan akhlakul karimah ”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah Desa Pegalangan Kidul dan seluruh lembaga desa dalam merealisasi pembangunan Desa Pegalangan Kidul secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) **Bersama Masyarakat Membangun Desa yang Makmur** terkandung upaya dan peran pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa yang maju, rukun dan sejahtera yang berlandaskan moral agama.
- 2) **Desa Maju** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan yang transparan juga partisipatif.
- 3) **Aman** adalah suatu situasi yang menimbulkan rasa rukun, damai dan tenang.
- 4) **Mandiri** adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur terpenuhi kebutuhan lahir dan batin.

5) **Berdasarkan Akhlakul Karimah** adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan perilaku masyarakat yang berbudaya.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Pemerintah Desa Pegalangan Kidul adalah sebagai berikut ;

1. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah desa
2. Mewujudkan kepemimpinan yang peduli terhadap masyarakat yang tegas dan berwibawa
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai lading membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kegiatan keagamaan
5. Membangun masyarakat dengan program-program pemberdayaan yang berkelanjutan dan juga berkesinambungan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2022

## B. Penyajian dan Analisis Data

### 1. Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa di Desa Pegalangan

#### Kidul

Menurut bapak Imam Masykuri selaku bendahara Desa Pegalangan Kidul menyatakan bahwa.

“Dalam suatu Desa akuntabilitas merupakan hal yang harus sangat diperhatikan, karena jika suatu Desa dalam pengelolaan laporan keuangan Desa tidak mengacuh kepada akuntabilitas bisa saja ada kecurangan didalam pengelolaannya. Desa pegalangan Kidul sudah menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan Desa, nanti adek bisa liat sendiri di LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban)”<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara diatas diperoleh hasil bahwasanya akuntabilitas di sebuah Desa sangatlah diperlukan, karena dengan adanya akuntabilitas membuktikan pertanggungjawaban suatu Desa terhadap pengelolaan laporan keuangan Desa. Desa pegalangan kidul sudah menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa.

Menurut Mohammad Ahsanur Rofi selaku masyarakat Desa Pegalangan Kidul.

“akuntabilitas di sebuah desa harus ada dan pencatatannya harus benar, karena anggaran yang diterima oleh desa harus jelas buat apa saja. Nanti juga kan diminta pertanggungjawaban-nya, kalo tidak tidak dicatat pembukuannya bakalan repot pas LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban)”<sup>56</sup>

Menurut Siti Nurhasanah selaku masyarakat Desa Pegalangan Kidul

“harusnya akuntabilitasnya ada ya karena kan setiap kegiatan pasti ada dananya nah dananya itu kan harusnya ngajukan dulu baru dapat

<sup>55</sup> Imam Masykuri, wawancara, pada tanggal 12 juni 2023

<sup>56</sup> Mohammad ahsanur rofi, wawancara, pada tanggal 13 juni 2023

anggaran, kalo akuntabilitasnya tidak ada kayaknya anggarannya tidak bakal dikasi”.<sup>57</sup>

Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa di Desa Pegalangan Kidul sudah mengacuh kepada standar akuntansi pemerintahan. Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Badrul Huda selaku kepala desa Pegalangan Kidul.

“tentu dalam pengelolaan laporan keuangan Desa harus mengacuh kepada akuntabilitas, karena disetiap kegiatan ataupun program kerja yang ada di Desa Pegalangan Kidul ini harus jelas pencatatan keuangannya, dari pencatatan tersebut nantinya dijadikan pertanggung jawaban pada saat LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintahan desa).<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil informasi yang diberikan informan diperoleh hasil bahwasanya Desa Pegalangan Kidul dalam pengelolaan laporan keuangannya sudah sesuai dengan akuntabilitas pengelolaan dana Desa hal ini diperkuat dengan bukti adanya pencatatan laporan keuangan desa yang diuraikan sebagai berikut:

**TABEL 4.3**

**Anggaran Dana Desa Pegalangan Kidul**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan *) Sumber Dana.
<b>1</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>		
	- Dana Desa	960.884.000	APBN
	- Alokasi Dana Desa	1.170.791.892	APBD
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	33.664.000	BHP
	-Bantuan Keuangan Kabupaten	60.603.200	APBD
<b>2</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>54.328.250</b>	<b>PAD</b>

<sup>57</sup> Siti Nurhasanah, wawancara, pada tanggal 19 juni 2023

<sup>58</sup> Badrul Huda, wawancara, pada tanggal 12 juni 2023



3	SILPA 2021	25.736.341	SILPA 2021
4	Bunga Bank 2022	653.187	Bunga Bank 2022
<b>J U M L A H</b>		<b>2.306.660.870</b>	

Sumber: LKJP tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	SUMBER DANA	OUTPUT
	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>					
1	Operasional Pemerintah desa	736,341	736,341	-	SILPA 2021	100%
2	Operasional Pemerintah desa/PTPKD	20,327,972	20,327,972	-	ADD	100%
3	Siltap Kades & Perangkat	298,476,720	298,476,720	-	ADD	100%
4	Jaminan Keselamatan Kerja Perangkat Desa/BPJS JKK	1,987,200	1,987,200	-	ADD	100%
5	Tunjangan & Operasional BPD 5 anggota	15,000,000	15,000,000	-	PAJAK/PBH	100%
6	Insentif RT/RW	12,600,000	12,600,000	-	PAJAK/PBH	100%
7	Operasional Pemerintah Desa	5,188,250	5,188,250	-	PAD	100%
8	Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa	49,140,000	49,140,000	-	PAD	100%
9	Intensifikasi Pemungutan Pendapatan Asli Desa/Bagi Hasil Pajak	6,064,000	6,064,000	-	PAJAK/PBH	100%
10	Alokasi Khusus Pilkades	60,603,200	60,603,200	-	BK Pilkades	100%
11	Pilkades Aman covid	25,000,000	25,000,000	-	SILPA 2021	100%
12	Profil Desa / IDM	2,000,000	2,000,000	-	DANA DESA	100%
13	Penyusunan APBDesa	5,000,000	5,000,000	-	DANA DESA	100%
14	Penyusunan Perubahan APBDesa	3,000,000	3,000,000	-	DANA DESA	100%
15	Penyusunan LKPJ	3,000,000	3,000,000	-	DANA DESA	100%
16	Penyusunan LPPD	1,500,000	1,500,000	-	DANA DESA	100%

17	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Penetapan BLT 2022	4,000,000	4,000,000	-	DANA DESA	100%
18	Penyusunan Musdes RPJMDesa / RKPDesa	30,000,000	30,000,000	-	DANA DESA	100%
19	Sistem Informasi Desa	37,540,000	37,540,000	-	DANA DESA	100%
<b>BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>						
<b>Sub Bidang Kesehatan</b>						
20	Posyandu Balita	84,500,000	84,500,000	-	DANA DESA	100%
21	Posyandu Lansia	17,800,000	17,800,000	-	DANA DESA	100%
22	Desa Siaga / RDS	214,500,000	214,500,000	-	DANA DESA	100%
23	BKB/BKL/BKR	7,500,000	7,500,000	-	DANA DESA	100%
24	KPM	5,500,000	5,500,000	-	DANA DESA	100%
<b>Sub Bidang Pekerjaan umum dan tata ruang</b>						
25	Pembangunan Pagar Kantor Desa RT 5 RW 1	200,000,000	200,000,000	-	ADD UMUM	100%
26	Pembangunan Saluran irigasi RT 7 RW 2	200,000,000	200,000,000	-	ADD UMUM	100%
27	Pembangunan Saluran Drainase dan Duiker RT 7 RW 2	150,000,000	150,000,000	-	ADD UMUM	100%
28	Pembangunan Saluran Irigasi RT 1 RW 1	150,000,000	150,000,000	-	ADD UMUM	100%
29	Pembanguna TPT dan gorong-gorong RT 10 RW 3	150,000,000	150,000,000	-	ADD UMUM	100%
<b>Sub Bidang Pariwisata</b>						
30	Pemeliharaan Sarana Prasarana Taman wisata	36,372,880	36,372,880	-	DANA DESA	100%
<b>BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT</b>						
-						
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>						
31	Penguatan Ketahanan Pangan	91,687,300	91,687,300	-	DANA DESA	100%
32	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan keluarga	10,020,000	10,020,000	-	DANA DESA	100%

BIDANG BELANJA TAK TERDUGA						
33	Belanja Tidak Terduga	9,763,820	3,200,000	6,563,820	DANA DESA	32,77%
34	Operasional BLT DD	12,000,000	12,000,000	-	DANA DESA	100%
35	BLT DD 107kpm x 12 bulan	385,200,000	385,200,000	-	DANA DESA	100%
36	Bunga bank 2022	653,187	-	653,187	BUNGA BANK	0%
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>2,306,660,870</b>	<b>2,299,443,863</b>	<b>7,217,007</b>		

Sumber: LKJP tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas Desa Pegalangan Kidul sudah lengkap baik dilihat dari segi ringkasan pendapatan, ringkasan belanja desa dan rincian pembangunan. Selain itu, telah terealisasi dengan baik sesuai dengan rancangan kerja tahun 2022. Sedangkan evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi.

## 2. Transparansi pengelolaan laporan keuangan Desa Pegalangan Kidul

Menurut Mohammad Ahsanur Rofi selaku masyarakat Desa Pegalangan Kidul

“seharusnya Desa memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa, supaya kita sebagai masyarakat percaya dengan apa yang mereka kerjakan dan berapa anggaran yang mereka keluarkan dalam pengerjaannya, jika tidak ada transparansi dari Desa kita kan tidak tau juga apakah pencatatannya benar apa salah, dengan adanya transparansi juga membantu meminimalisir kecurangan terhadap anggaran dana Desa dalam pengerjaannya.”<sup>59</sup>

Menurut Siti Nurhasanah selaku masyarakat Desa Pegalangan Kidul

<sup>59</sup> Mohammad Ahsanur Rofi, wawancara, pada tanggal 13 juni 2023

“kalo tidak ada transparansi dari desa bagaimana cara kita mengetahui akuntabilitas di desa. setiap program kerja yang dilaksanakan oleh desa harusnya dikasi tau berapa anggaran yang digunakan agar masyarakat juga tau bagaimana akuntabilitas yang ada di desa pegalangan ini.

Dari wawancara diatas diperoleh hasil bahwasanya transparansi terkait laporan keuangan Desa belum disediakan oleh pihak Desa sehingga masyarakat Desa Pegalangan Kidul tidak tahu apakah dalam pengelolaan laporan keuangannya Desa pegalangan kidul sudah skuntabel. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Standar Dalam hal transparansi Desa Pegalangan Kidul belum sepenuhnya menyediakan informasi terkait dengan pengelolaan dana Desa, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya media yang menyediakan informasi mengenai pengelolaan dana Desa berupa banner, website Desa dan beberapa media lainnya.

Menurut Suhut selaku masyarakat Desa Pegalangan Kidul yang berstatus sebagai petani

“saya kurang paham mengenai hal tersebut yang penting Desa Pegalangan kelihatan lebih maju aja saya sudah senang, pokoknya banyak hasil yang bisa kita nikmati seperti pembangunan, perbaikan jalan, sama bantuannya lancar berarti kinerja perangkat Desa sudah benar menurut saya.<sup>60</sup>

Menurut Badrul Huda selaku kepala Desa Pegalangan Kidul

---

<sup>60</sup> Suhut, wawancara, pada tanggal 13 juni 2023

“memang benar Desa Pegalangan Kidul belum bisa menyediakan informasi pengelolaan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat, akan tetapi setiap ada program kerja yang akan dilaksanakan oleh Desa, pihak Desa mengundang semua ketua Rt dan Rw yang ada di Desa Pegalangan Kidul untuk ikut andil dalam perencanaan serta pelaksanaannya. Tujuannya tidak lain untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan serta pengelolaan laporan keuangan Desa. Tidak adanya banner ataupun media yang berisi laporan keuangan Desa yang secara terbuka untuk masyarakat Desa pegalangan Kidul bukan berarti pihak Desa tertutup dalam hal tersebut, setiap masyarakat berhak mengetahui hal tersebut, seperti contoh adek Sofyan ini meminta izin untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi di Desa Pegalangan Kidul kami sediakan informasi seterbuka mungkin karena tujuannya jelas untuk pendidikan, akan tetapi jika masyarakat yang datang dengan tujuan membuat rusuh di Desa Pegalangan Kidul kami dari pihak Desa berhak menolak permintaan untuk mengakses laporan keuangan desa.<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara tersebut Desa Pegalangan Kidul belum bisa menerapkan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangannya dikarenakan kepala Desa Pegalangan Kidul Selalu mengikutsertakan Rt dan Rw yang ada di Desa Pegalangan Kidul dalam segala program kerja yang akan dilaksanakan oleh Desa sehingga hal tersebut bisa memberikan informasi terkait anggaran yang akan dikeluarkan oleh Desa yang kemudian bisa disampaikan oleh Rt dan Rw masing-masing kepada masyarakat Pegalangan Kidul, akan tetapi jika ada yang berkepentingan untuk mengetahui catatan laporan keuangannya Desa Pegalangan Kidul sangat terbuka untuk memberikan pengelolaan laporan keuangan Desa.

---

<sup>61</sup> Badrul Huda, wawancara, pada tanggal 12 juni 2023

### 3. Desa Pegalangan Kidul mampu maju dan berkembang tanpa adanya transparansi dana Desa

Desa pegalangan Kidul merupakan salah satu Desa maju yang ada di Kecamatan Maron, hal ini dibuktikan dengan banyaknya program kerja yang terealisasi diantaranya adalah perbaikan jalan, pembuatan saluran irigasi, pemasangan lampu penerang disetiap jalan, pdam, wifi desa, bank sampah beserta daur ulangnya, program kesehatan dan lain sebagainya.

Menurut Mohammad Ahsanur Rofi sebagai warga Desa Pegalangan Kidul

“memang benar selama bapak Badrul Huda ini menjabat sebagai kepala desa banyak membawa perubahan terhadap desa bahkan mampu membawa Desa Pegalangan Kidul lebih maju dari sebelumnya, akan tetapi transparansi keuangan desa kan harus disediakan buat masyarakat desa mosok desanya semakin maju transparansi dana desa nya belum ada”.<sup>62</sup>

Menurut Siti Nurhasanah sebagai warga Desa Pegalangan Kidul yang berstatus sebagai guru

“untuk kepala Desa yang sekarang ini cukup sukses membawa Desa Pegalangan Kidul menjadi lebih baik dari sebelumnya, kita tau sendiri berapa banyak fasilitas yang Desa berikan kepada warganya. Kepala Desa-nya juga inofatif bisa memberikan ide-ide baru bagi Desa Pegalangan Kidul.”<sup>63</sup>

Menurut Badrul Huda sebagai kepala Desa Pegalangan Kidul

“sebenarnya masih banyak potensi dari Desa Pegalangan Kidul ini untuk digalih dan tampilkan kepada khalayak ramai disamping itu warga Desa Pegalangan Kidul juga kompak dan antusias disetiap kegiatan yang diselenggarakan oleh desa, seperti contohnya lomba proklamasi kemarin, saya menghimbau kepada masyarakat Desa Pegalangan Kidul untuk menanam tumbuhan didepan rumah mereka

<sup>62</sup> Mohammad Ahsanur Rofi, wawancara, pada tanggal 13 juni 2023

<sup>63</sup> Siti Nurhasanah, wawancara, pada tanggal 19 juni 2023

masing-masing sebagai syarat penilaian di ajang lomba proklamasi dan terbukti semua warga Desa Pegalangan Kidul serentak menanam tumbuhan di halaman rumah mereka, alhasil Desa Pegalangan Kidul berhasil sebagai juara proklamasi tingkat provinsi. Mungkin ini adalah kurangnya transparansi tadi, insyaallah setelah ini dari pihak Desa akan menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan laporan keuangan Desa”<sup>64</sup>.

Dari wawancara diatas diperoleh hasil bahwasanya Desa Pegalangan Kidul bisa maju dikarenakan kompaknya masyarakat Desa Pegalangan Kidul dalam melaksanakan program kerja bersama perangkat Desa. Kepala Desa Pegalangan Kidul juga berjanji akan memberikan informasi pengelolaan laporan keuangan kepada masyarakat Desa Pegalangan Kidul.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan judul Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Laporan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo perlu kiranya diadakan pembahasan temuan. Yang hasil dari pada analisis data akan dikaji dengan teori yang ada untuk mengetahui keterkaitan keduanya guna dalam fokus masalah yang ada pada penelitian ini.

#### **1. Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa di Desa Pegalangan Kidul**

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan tanggungjawab bagi pihak yang

---

<sup>64</sup> Badrul Huda, wawancara, pada tanggal 12 juni 2023

memperkirakan tanggungjawab. Pembahasan tentang akuntabilitas mengarah kepada upaya-upaya pengalihan skema internal organisasi yang bersandar pada aspek profesionalisme di satu sisi dan relasi eksternal yang mengarah pada pertanggungjawaban sosial dan politik.<sup>65</sup>

Akuntabilitas juga sebagai bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik.<sup>66</sup> Dalam penyusunan laporan keuangan ada tiga indikator akuntabilitas yang harus ada yaitu tahap perencanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban.

Berikut merupakan data analisis selama melakukan penelitian di Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan desa pegalangan kidul sudah akuntabel artinya sudah menerapkan tiga indikator akuntabilitas baik secara perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencatatan laporan keuangan yang ada di LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) sehingga dapat diketahui bahwasanya desa pegalangan kidul dalam pengelolaan laporan keuangan desa sudah baik dan mengacuh kepada akuntansi pemerintahan. Dengan demikian

---

<sup>65</sup> Arif Widyatama, *jurnal riset dan aplikasi : akuntansi dan manajemen* (Kalimantan : STIE Panca Bhakti Palu, 2015), 203.

<sup>66</sup> Mardiasmo, *Akuntansi sektor publik* (Yogyakarta : ANDI, 2004), 3.



pengelolaan laporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

## 2. Transparansi pengelolaan laporan keuangan Desa Pegalangan Kidul

Berikut merupakan data analisis selama melakukan penelitian di Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.<sup>67</sup> Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa transparansi di Desa pegalangan kidul kecamatan maron kabupaten probolinggo belum disediakan hal ini dibuktikan

---

<sup>67</sup> Mardiasmo, *Akuntansi sektor publik* (Yogyakarta : ANDI, 2010), 30.

dengan tidak adanya media yang menyediakan informasi mengenai pengelolaan laporan keuangan baik berupa banner, baliho dan website desa. Akan tetapi dalam setiap program kerja yang akan dilakukan oleh pihak desa mengikutsertakan semua RT dan Rw yang ada di Desa pegalangan kidul yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui Rt dan Rw masing-masing sehingga program kerja yang akan dilakukan oleh pihak desa diketahui berapa anggaran yang akan dikeluarkan.

### **3. Desa Pegalangan Kidul bisa maju tanpa transparansi dana Desa**

Berikut merupakan data analisis selama melakukan penelitian di Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa desa pegalangan kidul mampu maju dan berkembang tanpa transparansi dana desa hal ini dibuktikan dengan banyaknya program kerja yang terealisasikan diantaranya adalah perbaikan jalan, pembuatan saluran irigasi, pemasangan lampu penerang disetiap jalan, pdam, wifi desa, bank sampah beserta daur ulangnya, program kesehatan dan lain sebagainya. Serta beberapa piagam penghargaan yang telah diraih oleh desa pegalangan kidul. Kepala desa pegalangan kidul juga berjanji akan segera menyediakan informasi mengenai pengelolaan laporan keuangan desa artinya desa pegalangan kidul sudah siap memberikan transparansi terhadap laporan keuangan desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai analisis akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan laporan keuangan Desa pada kantor Desa Pegalangan Kidul dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa Pegalangan Kidul**

akuntabilitas Desa Pegalangan Kidul sudah lengkap baik dilihat dari segi ringkasan pendapatan, ringkasan belanja desa dan rincian pembangunan. Selain itu, telah terealisasi dengan baik sesuai dengan rancangan kerja tahun 2022. Sedangkan evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi.

##### **2. Transparansi pengelolaan laporan keuangan Desa Pegalangan Kidul**

Desa Pegalangan Kidul memang belum menerapkan secara langsung informasi mengenai laporan keuangan Desa, akan tetapi setiap kali Desa Pegalangan Kidul melaksanakan program kerja mengajak seluruh Rt dan Rw yang ada di Desa Pegalangan Kidul untuk ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya yang kemudian informasi terkait anggaran tersebut disampaikan kepada masyarakat Desa melalui Rt dan Rw masing-masing

sehingga secara tidak langsung pihak Desa sudah transparan dalam melaksanakan program kerja yang ada di Desa Pegalangan Kidul.

3. Desa Pegalangan Kidul bisa maju tanpa transparansi dana Desa

Desa Pegalangan Kidul bisa maju dikarenakan inofasi dari kepala desa dan kekompakan masyarakat Pegalangan Kidul dalam melaksanakan program kerja di Desa Pegalangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan fisik yang terealisasikan dan juga program kerja yang masih berjalan sampai sekarang seperti bank sampah, daur ulang sampah, wifi Desa serta beberapa piagam penghargaan yang diraih oleh Desa Pegalangan Kidul. Kepala Desa Pegalangan Kidul juga berjanji akan memberikan informasi pengelolaan laporan keuangan Desa kepada masyarakat Desa Pegalangan Kidul.

**B. Saran**

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebuah harapan bagi pihak Desa Pegalangan Kidul untuk transparansi pengelolaan laporan keuangan Desa segera disediakan kepada masyarakat Desa Pegalangan Kidul.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Izzah, Hilya. 2018. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)." Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Betan, Nur Asia Usman, Paskah Ika Nugroho. 2021. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* Vol.5, No.1 : 133-139.
- Gwijangge, Nius, I Ketut Jati, I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, Ni Gusti Putu Wirawati. 2021. "Akuntabilitas, Transparansi Pemerintah Desa Dan Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi* Vol. 31 No. 6 : 1549-1560.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Jusup, Al Haryono. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Kumalasari, Deti, Ikhsan Budi Riharjo, 2016. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 11 : 1-15.
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi sektor publik* (Yogyakarta : ANDI), 3.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2010. *Akuntansi sektor publik* (Yogyakarta : ANDI), 30.
- Martani Dwi., dkk, 2014. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Cet. 1* (jakarta : Salemba Empat), 54.
- Mulyadi, Seto, dkk. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*. Depok: Rajawali Pers.
- Nahrudin, Zulfan. 2014. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru." *Jurnal ilmu pemerintahan* Vol. IV No. 2 : 193-201.

- Novatiani, Ait , R. Wedi Rusmawan Kusumah, Diandra Pepi Vabiani. 2019. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis - Vol 10 No 1* : 51-61.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: t.p.
- Nurlinda, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", 4
- Peraturan Bupati Probolinggo. Perbup Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Probolinggo.
- Peraturan Bupati Probolinggo. Perbup Nomor : 82 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rivan, Arif, Irfan Ridwan Maksum. 2019. "Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol.9 No.2 : 92-100.
- Sari, Fibrilisa Tunjung. 2017. "Pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015-2017 di Desa Ganting Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo." Skripsi, Universitas Jember.
- Subroto, Agus. 2009. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)." Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukartini, Amy Fontanella, Novrina Chandra. 2016. "Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Desa/Nagari." *Jurnal Akuntansi & Manajemen Politeknik Negeri Padang Vol.11, No.1.*: 50-65.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

- Tim Penyusun. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Ulum, Ihyaul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.
- Wahdaniyah. 2021. “Perwujudan Nilai - Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep *Value For Money* Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada Bappeda Kab. Gowa.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wahyu. 2018. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wahyudi, Kumorotomo. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Karya Pustaka Pelajar.
- Widiyanti, Arista. 2017. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Widyatama Arif, jurnal riset dan aplikasi 2018 : akuntansi dan manajemen, (kalimantan : STIE Panca Bhakti Palu), 203.
- Zulfan Nahrudin, “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA DI DESA PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU”, Vol. 4 (Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar), 2

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENLITIAN
<b>ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR DESA PEGALANGAN KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO</b>	1. Akuntabilitas dan Transparansi	1. Tahap perencanaan 2. Tahap pelaporan 3. Tahap pertanggungjawaban 4. Sistem perencanaan strategic 5. Sistem pengukuran kinerja 6. Sistem pelaporan keuangan 7. Saluran akuntabilitas publik 8. Auditing sektor publik	<b>1. Informan</b> a. Kepala Desa b. Bendahara Desa c. Masyarakat Desa <b>2. Refrensi</b> a. Buku b. Jurnal c. Dokumen Internet	<b>1. Pendekatan Penelitian:</b> Pendekatan kualitatif <b>2. Jenis Penelitian :</b> Deskriptif <b>3. Teknik Pengumpulan Data :</b> a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi <b>4. Analisis Data:</b> a. Pengumpulan Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan	1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa di Desa Pegalangan kidul 2. Mengapa Desa Pegalangan Kidul belum menerapkan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan Desa 3. Bagaimana Desa Pegalangan Kidul bisa berkembang tanpa transparansi dan desa
	2. Pengelolaan Laporan Keuangan Desa	1. Akuntabel 2. Transparan 3. partisipatif			



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Sofyan  
NIM : E20183025  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institusi : Universitas Negeri Islam Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 November 2023  
menyatakan



Moh Sofyan  
E20183025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-2023/Un.22/7.a/PP.00.9/04/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

18 April 2023

Kepada Yth

Bapak Badrul Huda selaku Kepala Desa Pegalangan Kidul,  
Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Moh Sofyan  
NIM : E20183025  
Semester : X (sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Laporan Keuangan Pada Kantor Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
KECAMATAN MARON  
DESA PEGALANGAN KIDUL

Jln. Dusun Krajan rt 01 / rw 01 Kode POS 67276

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 470/451/426.417.15/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BADRUL HUDA S.Pd

Alamat : Dusun Sukun RT 007 RW 002 Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron  
Kabupaten Probolinggo

Dengan ini menyatakan mahasiswa :

Nama : MOH SOFYAN

NIM : E20183025

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan tugas penelitian di Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo untuk memperoleh Data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Pada Kantor Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Pegalangan Kidul, 13 November 2023

Kepala Desa Pegalangan Kidul



**BADRUL HUDA, S.Pd**

## PEDOMAN WAWANCARA

### Rumusan masalah:

4. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa di Desa Pegalangan Kidul?
5. Mengapa Desa Pegalangan Kidul belum menerapkan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan Desa?
6. Bagaimana Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo bisa berkembang dengan pengelolaan laporan keuangan yang kurang transparansi?

### Wawancara:

1. Profil dan sejarah Desa Pegalangan Kidul?
2. Bagaimana letak geografis Desa Pegalangan Kidul?
3. Berapa jumlah penduduk yang ada di Desa Pegalangan Kidul?
4. Bagaimana kondisi ekonomi atau mata pencaharian masyarakat Desa Pegalangan Kidul ?
5. Bagaimana Struktur organisasi perangkat Desa Pegalangan Kidul ?
6. Bagaimana visi dan misi Desa Pegalangan Kidul ?
7. Bagaimana akuntabilitas yang ada di Desa Pegalangan Kidul ?
8. Apakah dalam pencatatan laporan keuangan Desa sudah menerapkan 3 indikator akuntabilitas (perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban)?
9. Mengapa transparansi Desa Pegalangan Kidul belum tersedia?
10. Apa faktor Desa Pegalangan Kidul bisa maju tanpa transparansi dana desa?

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	Selasa, 18 April 2023	a. Menyerahkan surat ijin penelitian kepada kepala Desa Pegalangan Kidul b. Pengenalan diri dan penyampaian tujuan penelitian c. Pengantar sejarah dan profil Desa
2	Kamis, 20 April 2023	a. ACC surat ijin penelitian b. Mengkonfirmasi kembali terkait kelanjutan penelitian
3	Senin, 8 Mei 2023	Melakukan wawancara pertama kepada perangkat Desa Pegalangan Kidul
4	Senin, 12 Juni 2023	Melakukan wawancara kedua kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa
5	Selasa, 13 Juni 2023	Melakukan wawancara ketiga kepada Mohammad Ahsanur Rofi
6	Rabu, 14 Juni 2023	Melakukan wawancara keempat kepada suhut
7	Senin, 19 Juni 2023	Melakukan wawancara kelima kepada Siti Nurhasanah
8	Senin, 13 Nvember 2023	Menyerahkan surat izin selesai penelitian kepada kantor Desa Pegalangan Kidul

## **DOKUMENTASI**



**Kantor Desa Pegalangan Kidul**



**Wawancara dengan kepala Desa Pegalangan Kidul**



**Wawancara dengan Muhammad ahsanur rofi**



**Wawancara dengan Siti Nurhasanah**



**Wawancara dengan Suhut**







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Malarum No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos: 60136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febji@uinkhas.ac.id](mailto:febji@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-158.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/11/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Moh Sofyan  
NIM : E20183025  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : Analisis akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan pada kantor desa pegalangan kidul kecamatan maron kabupaten probolinggo

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari naskah skripsi kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 November 2023

An. Dekan  
Kepala Bagian Akademik  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id)  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Moh Sofyan

NIM : E20183025

Semester : XI (sebelas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.



Jember, 14 November 2023  
Koordinator Prodi. Akuntansi  
Syariah,

Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak

NIP. 19880301291802001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BIODATA PENULIS



### Data Diri :

Nama : Moh Sofyan  
NIM : E20183025  
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 02 Januari 1999  
Alamat : Dsn. Krajan, Ds. Pegalangan Kidul, Kec. Maron,  
Kab. Probolinggo.  
E-mail : [sofyanmoh449@gmail.com](mailto:sofyanmoh449@gmail.com)  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

### Riwayat Pendidikan

1. SD/ MI : MI Raudlatul Ulum ( 2006-2012 )
2. SMP/MTS : SMP Raudlatul Jannah ( 2012-2015 )
3. SMA/MA : MA Walisongo ( 2015-2018 )
4. Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember ( 2018-2023 )